

Soal Budidaya Lobster di Wilayah Perairan NTB, Johan Rosihan: Perlu Diteliti Lagi

Syafruddin Adi - NTB.INDONESIASATU.CO.ID

Jun 15, 2021 - 20:19



Jakarta - Dalam sebuah Rapat Kerja komisi IV DPR RI bersama menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono membahas rancangan kerja Kementerian Kelautan dan perikanan untuk tahun 2021-2024 yang berlangsung di ruang sidang komisi IV DPR RI Selasa 15/06/2021 di kantor DPR RI jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta.

Pada rapat tersebut Anggota komisi IV DPR RI dari PKS dapil NTB Johan

Rosihan menyampaikan apresiasi kepada menteri Kelautan dan perikanan RI yang pada satu kali rapat kerja saja telah mampu merancang 3 terobosan sekaligus, dimana Peningkatan PNPB, peningkatan budidaya, dan Penataan kampung pesisir. Ketiga terobosan ini menurut Johan sangat bagus dan membuat penasaran dan tidak sabar menunggu realisasi dari pada terobosan - terobosan ini, ungkapnya.

Namun menurut Johan ada satu usulan yang mohon kiranya Bapak Menteri mau menambahkan satu program terobosan yaitu soal garam rakyat. Karena masalah garam saat ini biaya pikul itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga dari garam rakyat, "ungkap Johan".

Lebih lanjut Anggota Komisi IV dari PKS dapil pulau sumbawa ini mengatakan bahwa terobosan - terobosan ini semoga diwujudkan dan kami dari komisi IV siap mengawal. Untuk masalah PNPB kami sudah tidak ragukan lagi namun untuk dua terobosan lainnya harus bisa memberikan gambaran kepada kami, karena bila dilihat dari sarana prasarana kita yang masih sangat kurang. Disamping itu keberpihakan atau ciri kita sebagai masyarakat maritim itu tidak didukung oleh pemerintah terlihat dari besar anggaran yang dialokasikan selama ini. Menurutnya inilah tantangan kita dalam mewujudkan terobosan-terobosan tadi. Akan tetapi menurut Johan karena Pak menteri ini seorang pedagang maka terobosan-terobosan itu insyaallah akan bisa diwujudkan " Pungkasnya"

Ketika kita bisa memberikan janji soal PNPB yang sampai 12 triliun itu, menurut Johan kita juga harus dapat menggerakkan provinsi-provinsi itu, karena jangan sampai ketika PNPB ini naik, provinsi-provinsi yang keberadaannya dikelilingi laut dan terdapat banyak ikannya sampai saat ini kontribusinya masih rendah, tetapi ketika PNPB ini kita naikan kita berharap kontribusi provinsi-provinsi dari kelautan dan perikanan juga meningkat. Hal ini harus bisa kita yakinkan atau kita mengajak mereka secara bersama-sama sehingga provinsi-provinsi kepulauan ini dapat membantu meningkatkan kontribusinya, "ungkap Johan" .

Masalah selanjutnya yang perlu pengkajian lagi adalah masalah budidaya Lobster. Menurutnya kita tidak boleh termakan dari isu-isu atau pemberitaan dari media-media ataupun isu lingkungan, karena saat saya mampir di salah satu kampung / desa di kabupaten Lombok Tengah NTB dimana diwilayah tersebut pertama kali ditemukannya bibit lobster yaitu kampung Bumbung Desa Mertak. Menurut johan bila budidaya dilakukan di desa tersebut maka lobster ini tidak akan bisa berkembang dan bahkan mati, dikarenakan karakter laut yang beda untuk budidaya ini, dimana laut selatan ini arusnya kuat dan ini karakter tempat benih lobster sehingga benih atau bibit lobster ini banyak terdapat di laut ini, tetapi bila akan di budidaya maka harus pindah ke laut bagian utara yang arusnya rendah dan cocok untuk budidaya lobster, sementara bila harus pindah dari selatan ke utara mereka harus berurusan dengan banyak hal, oleh karenanya menurut kader PKS ini harus di kaji kembali. "Tutup Johan".(Adbravo)